

“JARGON POLITIK MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959-1965”

Abi Sholehuddin

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: mohammadabi@yahoo.co.id

Aminuddin Kasdi

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan jargon dan penerapannya sebagai proses mobilisasi massa cukup efektif dan efisien. Penggunaan jargon politik memiliki pengaruh yang besar terhadap masa Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 hingga 1965. Jargon tersebut membangkitkan semangat nasionalisme, anti imperialisme dan kolonialisme di Indonesia dengan Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Sikap Soekarno tersebut banyak tertuang dalam “manifesto politik” atau sistem demokrasi presidensil dengan satu komando sehingga kekuasaan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan presiden. Hal tersebut dimulai dengan diperlakukan kembali UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada perkembangan selanjutnya manifesto politik Soekarno banyak dipengaruhi ideologi-ideologi marxisme yang anti imperialisme dan barat khususnya ideologi komunisme (PKI).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa munculnya jargon politik pada masa Demokrasi Terpimpin sebagai instrumen penggerak massa sekaligus sebagai alat pembentukan opini yang diharapkan menumbuhkan rasa nasionalisme. Selain itu munculnya jargon politik juga mempunyai dampak politik dan sosial pada masa Demokrasi Terpimpin.

Kata kunci: Jargon, Politik, Demokrasi

Abstract

This research is motivated by the use of jargon and its application as a mass mobilization process is effective and efficient. The use of political jargon has a considerable influence on the Demokrasi Terpimpin period in 1959 until 1965. The Jargon evoke the spirit of nationalism, anti-imperialism and colonialism in Indonesia with Sukarno as a great revolutionary leader. The Soekarno attitude many contained in the "manifesto political exclusion" or presidential democratic system with a command so that the power is fully under the control of the president. It started with the treated back 1945 by Presidential Decree July 5, 1959, on further development of political manifesto Soekarno heavily influenced Marxist ideologies anti-imperialism and western particular ideology of communism (PKI).

The results of this study explained that the emergence of political jargon during the Demokrasi Terpimpin as an instrument of mass mover as well as opinion-forming tool which is expected to foster a sense of nationalism.

In addition, the emergence of political jargon also has political and social impacts during the Demokrasi Terpimpin.

Key word: Jargon, Politics, Democracy

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya Demokrasi Terpimpin di Indonesia diawali pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan penuh pemerintahan karena pada masa Demokrasi parlemen perpolitikan dalam negeri mengalami krisis politik dan kekacauan di berbagai bidang. Awal demokrasi Terpimpin dimulai dengan adanya surat mandat Dekrit Presiden Juli 1959 akibat belum tersusunnya Undang-Undang Dasar Negara dan banyaknya kepentingan-kepentingan politik antar partai. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin menambah kekacauan bahkan menjurus menuju gerakan Separatisme yang memperparah keadaan politik pada masa parlement. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat, dan keadaan semakin sulit untuk menemukan solusi mempersatukan perbedaan antar partai. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menggunakan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Konflik antar partai politik inilah yang mengganggu stabilitas nasional sehingga menyebabkan keterpurukan politik dalam negeri pada masa Demokrasi parlemen.

Soekarno sebagai presiden Indonesia yang pertama pada masa Demokrasi Terpimpin berusaha untuk memperbaiki keadaan dan perpolitikan secara nasional melalui Dekrit Presiden. Setiap pidato Soekarno mampu membakar semangat perjuangan kepada rakyat untuk selalu bersatu membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Langkah Berikutnya yang dilakukan oleh presiden Soekarno untuk membangun Indonesia pada tahun 1960-an adalah menggunakan konsep “revolusi belum selesai”. Konsep tersebut merupakan konsep yang digunakan Soekarno untuk menolak ideologi barat yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia setelah berdirinya suatu Negara (Indonesia).¹

Pada masa Demokrasi Presidensial terdapat empat kekuatan partai yang mengisi parlemen yaitu NU, Masyumi, PNI dan PKI. Namun pada kenyataannya Soekarno lebih

memilih partai Komunis Indonesia (PKI) dikarenakan politik poros Soekarno yang lebih cenderung ke negara Sosialis hal tersebut dibuktikan dengan poros Jakarta-Peking, Jakarta-Hanoi. Hal tersebut melanggar Undang-Undang Dasar Indonesia yang berpolitik secara bebas aktif.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, presiden Soekarno telah memberikan tempat bagi PKI dalam sistem perpolitikan nasional karena menurut Soekarno, PKI telah terbukti mempunyai basis masa terbesar di Indonesia daripada partai-partai lain, atas posisi teresut Soekarno yang melaksanakan konsepsi NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) sebagai landasan Demokrasi Terpimpin dan kolektivitas berbagai partai menjadi satu. Konsep revolusi yaitu revolusi nasional 17 Agustus 1945, revolusi sosial dan revolusi komunis menghasilkan jargon “*Revolusi Belum Selesai*” sangat relevan yang terus menguat, sehingga mempermudah Soekarno menjalankan sistem Demokrasi Terpimpin untuk meraih dominasi politik.² Dalam konteks Demokrasi Terpimpin hubungan Soekarno selaku Presiden menjadi dekat dengan PKI.

Di sisi lain, Partai Komunis Indonesia (PKI) memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden Soekarno memberikan konsistensi dan dukungan sepenuhnya atas segala kebijakan yang dilakukan oleh Soekarno. Selanjutnya PKI mengindoktrinasi pandangan idealis terhadap Soekarno untuk menggerakkan rakyat Indonesia melalui jargon yang disampaikan Soekarno.

Dalam menyampaikan kebijakan politiknya, Presiden Soekarno menggunakan jargon-jargon politik agar mudah dipahami dan mudah diingat oleh rakyat. Pada masa Demokrasi Terpimpin penggunaan jargon dianggap sebagai penggerak massa yang mampu melecutkan semangat perjuangan rakyat membangun bangsa Indonesia. Jargon dalam penerapannya sebagai proses mobilisasi massa yang efektif untuk mendukung kampanye-kampanye patriotik yang selalu digemakan secara revolusioner. Penggunaan jargon politik memiliki daya pikat tersendiri bagi rakyat

¹Aminuddin, Kasdi, 2009, *Kau Merah Menjara* (Aksi sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965), Surabaya :YKCB-CICS.

²Rex, Mortimer, 2011, *Indonesian Communism Under Soekarno (Idiologi dan Politik 1959-1965)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.59

karena pada masa itu Soekarno mampu mengkristalisasikan dan mengekspresikan perasaan-perasaan yang selaras rakyat Indonesia.

B. Batasan Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang ada, peneliti mengambil ruang lingkup masalah tentang jargon politik demokrasi terpimpin pada masa Soekarno tahun 1959-1965. Hal ini dimaksudkan agar masalah penelitian tidak menjadi terlalu luas dan berkembang terlalu jauh, sehingga dalam pembahasan masalah dapat terarah dan terfokus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut yaitu :

- I. Bagaimana jargon-jargon politik muncul pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 – 1965?
- II. Bagaimana penggunaan jargon sebagai instrumen penggerak massa dan politik pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 - 1965?
- III. Bagaimana dampak jargon politik Soekarno dalam kehidupan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 - 1965?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan munculnya jargon-jargon politik pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 – 1965.
2. Menjelaskan penggunaan jargon sebagai instrumen penggerak massa dan politik pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 – 1965.
3. Menjelaskan dampak jargon politik Soekarno dalam kehidupan politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan akan menambah khasanah historiografi Indonesia. Selain itu dapat

menambah wawasan dan memberikan pengetahuan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan juga memperkaya kajian sejarah terutama penggunaan jargon politik masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.

Penulisan sejarah ini diharapkan juga dapat bermanfaat untuk melengkapi referensi perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, terutama di perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah. Hal ini berfungsi sebagai bahan informasi bagi seluruh civitas akademik, khususnya mahasiswa sejarah.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bacaan dan bahan kajian sehingga dapat menambah informasi serta pengetahuan tentang penggunaan jargon politik pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965. Selain itu secara umum, penulis berharap tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan manfaat pula bagi dunia pendidikan.

F. Tinjauan Pustaka

Beberapa buku referensi yang telah membantu peneliti dalam penelitian ini adalah, pertama, buku karangan Rex Mortimer yang berjudul *"Indonesian Communism Under Soekarno"*. Buku ini menganalisa berbagai ide, program, dan kebijakan PKI selama Demokrasi Terpimpin, dan menunjukkan bagaimana berbagai hal itu dikembangkan dan dilaksanakan. Rex Mortimer dengan seksama meneliti hubungan antara PKI dan Presiden Soekarno menawarkan intrerpretasi jargon politik terhadap peristiwa menjelang kudeta yang gagal dan kehancuran berdarah PKI pada 1965. Buku kedua karangan Rosihan Anwar berjudul *Soekarno – Tentara – PKI: Segitiga kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961-1965*. Adapun sinopsis buku karangan Rosiana Anwar, yakni seperti berikut: Mula-mula tentara (pimpinan Jendral TNI Nasution) bekerjasama dengan Soekarno dalam memperkecil peran partai politik sembari memperkenalkan konsep (golkar), memperlakukan kembali UUD 45 dan membawa Indonesia ke sistem Demokrasi Terpimpin. Menyadari kemudian bahwa tentara secara politik makin kuat, Soekarno mengubah taktik. Dengan konsep Nasakom mulai dikampanyekan pada tahun 1960- Soekarno

berbalik memperkuat parpol untuk digunakan sebagai pengimbang menghadapi tentara.

Ketiga, adalah buku karangan Herbert Feith yang berjudul *Soekarno dan Militer (dalam Demokrasi Terpimpin)* yang berisi tentang analisa mengenai sistem Demokrasi Terpimpin yang kelihatannya bersifat struktural, akan tetapi yang nyata sekarang ialah bahwa sistem itu justru sedang berubah sifatnya pada tahun 1962-1963.

G. Metode Penelitian

Penelitian Sejarah ilmiah dan disiplin harus mentaati aturan prosedur kerja disebut metode sejarah. Metode sejarah merupakan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Data yang diproleh dikontruksi dengan menempuh proses historiograf.³ Menggunakan metodologi harus sesuai tahapan interdisipliner sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi) dan pendekatan ilmu bantu untuk mempertajam analisis dalam penelitian.

Pada penelitian ini, penelusuran sumber (Heruistik) disini penulis melakukan penelusuran sumber atau pencarian sumber sejarah. di awali dengan memcarri berbagai literatur dan akhirnya penulis memperoleh sumber berupa Sumber Koran sejaman juga didapat di perpustakaan Nasional yang terbit antara tahun 1959-1965, antara lain Koran Pantjawarna, Warta Bhakti dan Harian Rakjat.

Setelah beberapa fakta yang diperoleh secara kolektif, maka diinterpretasi penafsiran/analisis dari sumber sehingga dapat terekontruksi fakta sejarah dari sumber tersebut. Interpretasi juga digunakan untuk menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam waktu yang sama.

Pada tahap akhir dilakukan laporan sebagai hasil penelitian sejarah tentang Penggunaan Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965. Hasil laporan harus tersaji dalam bentuk tulisan, kemudian disusun secara kronologis sebagai kisah sejarah, suatu sintesa yang komperhensif, kausalitas, dan kronologis dalam bentuk skripsi.

³ Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal: 2

H. Sistematika penulisan

Sistematika Penulisan tentang “Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965”, Secara pokok terbagi menjadi tiga bagian yaitu Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup. Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab II Bagaimana jargon-jargon politik muncul pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 – 1965, menjelaskan makna dan gambaran umum kondisi politik masa Demokrasi Terpimpin yang bersifat anti imperialisme. Indonesia berusaha aktif berjuang membantu bangsa-bangsa terjajah untuk menghapuskan Imperialisme dan kolonialisme demi tercapainya perdamaian dunia. Bab III Munculnya Jargon-jargon Politik pada Tahun 1959-1965, menjelaskan bagaimana jargon muncul dan membuat semakin memanas nya suhu politik di Indonesia khususnya dalam proses menyelesaikan masalah di dalam negeri. Bab IV Jargon-jargon Politik dalam Media Massa, menjelaskan dampak jargon dalam politik dan sosial Indonesia. Bab V Penutup, yang membahas tentang kesimpulan mengenai penggunaan jargon pada masa demokrasi terpimpin.

KONDISI POLITIK DAN SOSIAL DEMOKRASI TERPIMPIN PADA TAHUN 1959-1965

A. Kondisi Politik Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Indonesia Tahun 1956 Konstituante tidak berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Keadaan itu semakin mengguncangkan situasi politik di Indonesia. Bahkan, masing-masing partai politik mementingkan kepentingan partai demi tujuan partainya tercapai. Oleh sebab itu, sejak tahun 1956 kondisi dan situasi politik negara Indonesia semakin buruk dan kacau.

Keadaan yang semakin bertambah kacau itu sangat membahayakan dan mengancam keutuhan negara dan bangsa Indonesia karena selain Konstituante gagal menetapkan UUD yang baru juga timbulnya berbagai pemberontakan di Indonesia yaitu: DI/TI di

Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan, Permesta di Sulawesi Utara, PRRI di Sumatera dan RMS di Maluku. banyak Suasana semakin bertambah panas karena adanya ketegangan yang diikuti dengan sikap dari setiap partai politik yang berada di Konstituante. Rakyat sudah tidak sabar lagi dan menginginkan agar pemerintah mengambil tindakan yang bijaksana untuk mengatasi kemacetan sidang Konstituante namun konstituante ternyata tidak dapat diharapkan lagi.

Kegagalan Konstituante untuk melaksanakan sidang-sidangnya untuk membuat undang-undang dasar baru. Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa tokoh partai politik diantaranya Soewirjo ketua umum PNI mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Waktu itu pemberlakuan kembali Undang-undang Dasar 1945 dianggap sebagai langkah terbaik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut: (1) Pembubaran Konstituante. (2) berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, (3) Pembentukan MPRS

Revolusi politik di Indonesia pada masa itu bukan mendirikan kekuatan segolongan atasan saja juga tidak mendirikan kekuasaan diktatorial kaum proletar, tapi harus mendirikan kekuasaan gotong-royong, kekuasaan menerapkan demokrasi yang menjamin terkonsentrasi seluruh kekuatan nasional, seluruh kekuatan rakyat.⁴

Indonesia dalam fase perpolitikan Demokrasi Terpimpin telah menyederhanakan struktur politik dengan memusatkan kekuatan di dua lembaga antara Soekarno dan Angkatan Darat

⁴ H.Roslan.Abdulgani, 1961, Penjelasan Manipol-Usdek, *Bahan-bahan Indoctrinasi*. A.Reachim. Djember: Penerbit Sumber Ilmu, hlm 149

sedangkan PKI sebagai partai politik dengan basis massa yang besar menjadi kekuatan ketiga. Sistem Demokrasi Terpimpin ini kemudian dikemas dalam tiga kekuatan besar yakni Soekarno, Angkatan Darat dan Komunis.⁵ Kemudian juga digencarkan indoktrinasi Manipol-Usdek (Manifesto Politik, UUD 45, Sosialisme indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin) jargon politik Soekarno sebagaimana agar rakyat Indonesia agar tidak terbius oleh retorika politik.⁶ Rakyat yakin benar bahwa Sekarno adalah figur yang sesuai dengan kriteria-kriteria pemimpin yang dibutuhkan.⁷ Soekarno berhasil memikat massa dan membawa pengikutnya ke arah fokus utama kepribadiannya, selain itu Soekarno mampu mengguncang perasaan pendengarnya dengan daya meyakinkan yang sangat besar.

Arah politik luar negeri Indonesia juga terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas-aktif menjadi condong pada salah satu poros. Pada masa itu diberlakukan politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis, seperti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik konfrontasi dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces). Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara kornunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim). Perwujudan poros anti imperialisme dan kolonialisme itu dibentuk poros Jakarta - Phnom Penh - Hanoi - Peking - Pyong Yang. Akibatnya ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit, karena berkiblat ke negara-negara komunis. Selain itu, pemerintah juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ongkohham, 1978, *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta:LP3S, hlm. 21

membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo. Para pemimpin PKI, Aidit, Njoto, dan lain-lain yang menuliskan statemen politik mereka dalam slogan-slogan Demokrasi Terpimpin dan menegaskan sikap mendukung Manipol juga harus mendukung Nasakom dan Resopim. Keadaan sosial-politik massa Demokrasi Terpimpin yang lebih condong ke kiri akibat unsur-unsur PKI yang amat kental. Oleh karenanya yang menjadi obyek jargon-jargon perjuangannya adalah BTI (Barisan Tani Indonesia). BTN adalah organisasi massa petani yang terhubung ke Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan memberikan Blow up secara besar-besaran selain untuk menarik perhatian dan dukungan sosial-politik, juga menjadi propaganda misi perjuangan PKI. Kasus-kasus aksi sepihak di Jengkol, Kediri (1961), HMI-Utrecht di Jember (1963), kasus Manikebu (1963-1964), kasus Kanigoro, Kras, Kediri (1965) dan masih banyak lagi. Indonesia yang akan dijadikan Negara Komunis lewat berbagai macam cara seperti Landreform telah menimbulkan gesekan dan benturan politik, social, budaya dan militer antara sepanjang tahun 1959 dan 1965. Landreform yang dimanfaatkan kaum komunis dengan srtategi tidak lepas dari doktrin partai komunis. Jalan revolusi dengan melenyapkan kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap lawan. Untuk itu mereka ciptakan jargon ‘kawan’ bagi teman seperjuangannya, dan ‘lawan’, bagi yang dianggap sebagai musuh.

Di lain pihak PKI memanfaatkan betul kampanye perebutan kembali Irian Barat yang mencapai puncaknya pada 1961-1962 pada penekanan yang terkandung dalam konsep-konsep yang berfungsi menjustifikasi pada kampanye untuk membangkitkan antusiasme publik. Slogan yang digunakan Soekarno pada pidato 13 Desember 1961, menyerukan rakyat menggagalkan pembentukan negara merdeka Papua, bersiap mengibarkan bendera merah-putih di tanah Irian Barat dan menyiapkan diri bagi mobilisasi umum dengan Jargon Trikora. Dua bulan sebelumnya Palitbiro telah menerbitkan pernyataan yang tegas dan menuntut dengan tegas agar presiden segera memberi komando “Merebut Irian barat dengan Segala Cara”. Jalan Trikora (Tri Komando

Rakyat) adalah istilah selanjutnya untuk menamai perintah terakhir Soekarno, singkatan dari Tri Komando rakyat untuk menggagalkan pembentukan negara boneka Papua.

B. Konsolidasi Kekuatan oleh Bung Karno

a. Dalam Negeri

Kondisi Indonesia pasca Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959 dapat dikatakan menjadikan Soekarno sebagai subjek tunggal. Rasa kebangsaan yang kuat sebagai elemen terpenting proses pembangunan bangsa Indonesia yang baru yang memasuki babak baru yakni sistem Demokrasi Terpimpin. Pemikiran ini tentunya membantu melegitimasi peran para pemimpin yang mengartikulasikan simbol-simbol nasional dengan mempersepsikan rakyat sebagai patriot-patriot yang menolak cara-cara asing mengintervensi dan dominasi luar negeri terhadap Bangsa Indonesia.⁸

Pemikiran Soekarno memiliki daya persuasi sedemikian kuatnya sehingga mampu memaksakan pemikiran-pemikirannya untuk menjadi fondasi dalam perumusan platform politik Indonesia. Soekarno sebagai Presiden pertama sangat ideal. Soekarno menduduki tiga status istimewa. Pertama, Soekarno sebagai sebagai institusi politik, kedua, Soekarno sebagai pemikir dan pengagas, dan ketiga, Soekarno sebagai ideologi. Kekuatan dalam negeri yang lebih ditekankan pada gencangan-gencangnya Nasionalisme yang anti barat dan berpegang teguh pada Pancasila. Soekarno sebagai aktor utama pada masa Demokrasi Terpimpin. Kepentingan politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang timbul di dalam negeri. Di antara permasalahan-permasalahan tersebut adalah masalah politik dan ekonomi. Situasi tersebut membuat Soekarno memposisikan diri sebagai unsur politik yang mendominasi meskipun penerapannya tidak terlepas dari pengaruh Angkatan Darat. Kebijakan politik luar negeri Indonesia memperhatikan kepentingan nasional,

⁸Rex, Mortimer, 2011, *Indonesian Communism Under Soekarno (Idiologi dan Politik 1959-1965)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.196

termasuk masalah konfrontasi terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia. Dari sudut pandang kepentingan nasional Indonesia, dapat difahami alasan konfrontasi tersebut dilakukan. Keadaan politik dalam negeri pada masa Demokrasi Terpimpin membuat sebagian kepentingan dalam negeri dikaitkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia, misalnya; konfrontasi sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai alat "pengalihan" keterpurukan ekonomi.

Sebelum Demokrasi Terpimpin, semangat nasionalisme Indonesia yaitu kurun waktu 1950-1957, pada masa itu, Indonesia dan motto "Bhineka Tunggal Ika" mengalami berbagai ujian perpecahan kesatuan dengan munculnya berbagai gerakan separatis yang bersifat kedaerahan. Kemudian masa Demokrasi Terpimpin muncul berbagai konfrontasi, akan tetapi semangat persatuan tumbuh dengan mengatas namakan kepentingan nasional. Masalah pada saat Demokrasi Terpimpin selain perpecahan unsur politik dan militer adalah keterpurukan ekonomi. Berbagai kebijakan ekonomi dilakukan meskipun hasilnya jauh dari yang diharapkan. Soekarno memandang negara yang masih dalam taraf membangun sebagai negara yang baru merdeka haruslah mengedepankan kebijakan politik dan pembangunan ekonomi bukanlah suatu bagian yang paling penting untuk proses *national building*.

b. Luar Negeri

Garis-garis besar politik Luar Negeri Indonesia berdasarkan pada Pembukaan UUD 45 yaitu membentuk suatu Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Sifat politik Luar Negeri Indonesia adalah bebas aktif anti imperialism dan kolonialisme yang bertujuan mengabdi pada perjuangan kemerdekaan nasional, perjuangan untuk kemerdekaan nasional dari seluruh bangsa-bangsa di dunia dan mengabdi pada perjuangan untuk membela perdamaian dunia. Ketiga tujuan itu harus disatukan dalam perjuangan untuk Membangun dunia kembali.⁹

⁹Soekarno, *Membangun Dunia Kembali (MDK)*, Kempen, 1960 hlm. 88-90.

Politik Luar negeri adalah kebijaksanaan luar negeri yang dilaksanakan berdasarkan kepada kepentingan nasional. Kepentingan nasional harus dibagi menjadi empat bagian yaitu kepentingan nasional yang vital, menyangkut hidup matinya suatu Negara yang diimbangi oleh kebijaksanaan yang mendesak. Selain itu ada kepentingan Nasional jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Banyak orang mengatakan bahwa politik Luar negeri pada masa Soekarno itu membawa dampak positif dan negatif.

Dampak positif dari pelaksanakan politik luar negari, seperti halnya masalah pembebasan Irian Barat dapat dikatakan sebagai kepentingan Nasional yang sangat vital karena menyangkut integritas bangsa. Dari segi ini politik luar negeri yang dijalankan sangat tepat dalam memanfaatkan situasi perang dingin. Sisi positif politik luar negeri yakni Soekarno sebagai pemimpin bangsa kelima terbesar di dunia ingin menonjolkan ideologi bangsanya yaitu Pancasila. Menurut Soekarno, Pancasila ialah ideologi yang tepat yang digunakan PBB untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dunia saat itu.

Sedangkan dari segi negatif, politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri yang berdasarkan Teori dua kubu Nefos dan Oldefos yang sebenarnya ialah merupakan "politik prestise" bukan berdasarkan kepentingan Nasional. Indonesia yang ingin menjadi pemimpin Blok Nefos sebenarnya jauh dari kepentingan Nasional walaupun sesuai dengan politik anti imperialis dan antikolonialis. Indonesia berada dalam posisi *non-blok* dan Soekarno lebih suka mengenalkan Indonesia di mata Internasional. Sisi negatif lain seperti pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif sebenarnya sudah tidak bebas lagi dengan politik poros-porosan karena jelas berpihak dan masuk dalam strategi Front Persatuan dengan RRC.

Politik luar negeri yang berdampak positif dapatlah dikatakan politik luar negeri yang berdasarkan pada kepentingan nasional Indonesia, sedangkan Politik luar negeri yang berdampak negatif hanyalah merupakan "politik luar negeri Soekarno", dimana Soekarno sendiri yang berperan dengan

mengatasnamakan Indonesia. Kelemahan dari Soekarno ialah politik luar negeri yang dijalankan tidak realis dan pragmatis. Relasi berarti memandang kenyataan yang ada yaitu seberapa jauh kemampuan Indonesia dalam percaturan Internasional, sedangkan pragmatis yaitu apakah kebijaksanaan yang dijalankan itu menguntungkan Indonesia baik politik maupun ekonomi. Banyak pengamat mengatakan bahwa politik luar negeri pada masa itu cenderung radikal. Radikal dalam artikata menafsirkan anti imperialisme dan kolonialis sehingga menempatkan Indonesia harus berhadapan secara frontal dengan blok Barat.

Politik bebas aktif menurut Soekarno ialah bebas memihak tapi tidak terikat. Soekarno cenderung memihak Blok Sosialis karena blok inilah yang merupakan tandingan dari Blok Barat yang di anggap Soekarno kekuatan Imperialisme-Kolonialisme (*OLDEFOS*). Keluarnya Indonesia dari PBB secara sepahak karena kekecewaan Soekarno kepada PBB sejak awal. Soekarno mengatakan PBB hanyalah alat kepentingan-kepentingan Negara-negara besar terutama Barat.

Pemikiran Soekarno yang dituangkan dalam “Membangun Dunia Kemabali” mengenai Politik adalah panglima. Pembangunan ekonomi menurut Soekarno membuat rakyat terikat pada Negara yang member bantuan. Oleh sebab itu Soekarno mengatakan “*Go To Hell With Your Aid*” kepada AS tatkala AS tidak mau lagi membantu Soekarno dalam Politiknya.

MUNCULNYA JARGON-JARGON POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959-1965

A. Pengertian Jargon Politik

Dalam kamus linguistik, jargon adalah kosakata yang khas yang digunakan dalam bidang kehidupan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, jargon juga biasa disebut dengan slogan, slang atau patois. Berdasarkan fungsinya, jargon memiliki fungsi untuk memudahkan, menyederhanakan atau dapat juga mengidentifikasi tujuan dan harapan dalam bentuk kata yang menarik sehingga mudah diingat. Jargon merupakan bahasa yang

digunakan golongan tertentu baik secara lisan maupun secara tulisan. Penggunaan jargon dapat meningkatkan prestise, citra bagi penggunanya, apalagi jargon dikaitkan dengan profesi tertentu yang dinikmati oleh kelas sosial yang tinggi. Meskipun jargon memainkan peranan legitimasi, namun dalam praktiknya istilah jargon tersebut sering pula mengalami penyalahgunaan oleh kalangan tertentu yang menggunakan jargon untuk tujuan menyesatkan orang lain. Jargon politik di masa Demokrasi Terpimpin seringkali digunakan untuk mengungkapkan situasi politik sosial-budaya yang terjadi antara tahun 1959-1965. Seperti yang kita tahu masa Demokrasi Terpimpin ditandai dengan politik mercusuar dan konfrontasi yang dicetuskan oleh presiden Soekarno terhadap negara-negara liberal-kapitalis atau yang disebut Oldefo (*Old Emerging Force*). Soekarno berusaha mengendalikan keadaan melalui pidato-pidatonya. Nada memerintah senantiasa terlihat dalam amanatnya, baik kepada Menteri maupun kepada segenap aparat negara. Tatkala pada penutup pidatonya Ia berkata, “Sekian, kerjakan komandoku!, Jangan jegal perintah saya”. Misalnya yang pertama, Saya komandokan kepada segenap aparat negara untuk selalu membina persatuan dan kesatuan kekuatan progresif revolusioner. Dua, menyingkirkan jauh-jauh tindakan-tindakan diskriminatif seperti rasialisme, pembakaran-pembakaran dan perusakan-perusakan. Tiga, menyingkirkan jauh-jauh fitnah-fitnah dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas-dendam. Namun di pihak lain Soekarno terlihat getir sebagai seorang presiden yang ucapannya tidak didengar lagi oleh para jenderal yang dulu sangat patuh kepadanya. Komando dan perintah Soekarno tidak dimuat oleh surat kabar dan ucapannya dipelintir. Pers barat pada masa Demokrasi Terpimpin juga mencatat bahwa di Indonesia terdapat banyak Jargon-jargon yang menjurubicarai kepentingan rakyat dan mudah di ingat oleh rakyat dan Soekarno memandang hal tersebut sebagai garis-garis kerakyatan atau garis-masa rakyat Indonesia.

B. Jargon Sebagai Alat Penggerak Massa dan Politik

Irian Barat telah menjadi agenda perjuangan Indonesia sejak Konferensi Meja Bundar, sedangkan tahap baru dalam menyelesaikan sengketa tersebut baru terlihat dalam tahun 1960, dan selanjutnya pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk menghadapi politik dekolonialisasi ataupun pembentukan Negara Papua Barat dari pemerintah Belanda, Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta untuk merebut Irian Barat. Jargon *Revousi Belum Selesai* menjadi sikap anti neokoloniaisme dan anti imperialisme terhadap imperialis Belanda yang masih menguasai wilayah kesatuan republik Indonesia di bumi Papua.

Dalam periode sebelum munculnya Demokrasi Terpimpin PKI berusaha mencari jalan damai menuju pemerintahan demokrasi rakyat, oleh karena itu menjadi peting bagi PKI untuk mempertahankan garis pendekatan yang dapat menghasilkan gerak penyesuaian antara PKI dengan kelompok-kelompok elit politik lainnya kemudian PKI menemukan bahwa yang menjadi tempat terbaik aliansi politik yaitu PNI dan Presiden. Salah satu konsepsi utama PNI dan Soekarno adalah isu tentang perlawan terhadap imperialisme Belanda dan Amerika Serikat. Alasan pertamanya imperialism memiliki pengaruh langsung bagi Indonesia. Presiden Soekarno dengan isu pembebasan Irian Barat kemudian mengadakan perjalanan-perjalanan ke luar negeri. Menurut Soekarno bangsa-bangsa lain kini lebih memahami perjuangan rakyat Indonesia untuk memasukkan kembali Irian Barat ke dalam kekuasaan Indonesia. Selain itu menurut Soekarno semua orang dan pemerintah Negara-negara lain telah menyatakan kekagumannya terhadap sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia berjalan di atas jalan yang benar. Kemudian isu komunisme di Indonesia juga menjadi perhatian internasional dan Soekarno mewakili aliran nasionalis-progresif di Asia Tenggara. Pertentangan pendirian antara Soekarno dengan TNI terhadap dua hal yaitu persoalan Irian Barat dan persoalan PKI pada tahun 1961 juga mulai muncul. Pidato Soekarno 17 Agustus 1961 yang berjudul “Re-So-Pim”

yang merupakan semboyan baru setelah sebelumnya pidato pada peringatan 17 Agustus 1959 diberi judul *The Rediscovery of Our Revolution* yang kemudian dikenal dengan Manifesto Politik dengan intisarinya dinamakan “Usdek” pidato 17 Agustus 1960 diberi nama “*Laksana Malaikat Menyerbu dari Langit*”. Karena inilah yang dianggap sebagai doktrin revolusi Indonesia sendiri, yakni dasar, haluan, dan tujuan Revolusi 17 Agustus 1945.¹⁰ Revolusi Indonesia didasari oleh Pancasila, berpedoman kepada Manipol-Usdek dan bertujuan menyelesaikan tiga kerangka tujuan revolusi. Soekarno menekankan bahwa siapa yang setuju Pancasila harus setuju Nasakom dan barangsiapa tidak setuju dengan Soekarno akan mendapatkan “*karantina politik*”.

C. Jargon Sebagai Alat Untuk Mempertebal Nasionalisme

Setelah wilayah Irian Barat masuk menjadi wilayah Indonesia pada tahun 1963, perjuangan bangsa Indonesia belum selesai. Dwikora atau Dwi Komando Rakyat yang diucapkan oleh Presiden Soekarno, telah membawa Indonesia kembali ke arah politik konfrontasi yang baru dengan usaha-usaha untuk mendukung Dwikora pun mulai bergerak. Tantangan justru datang dari negara yang dekat dengan bagian barat wilayah Indonesia yaitu Malaysia yang ingin mendirikan federasi Malaysia termasuk Sabah dan Serawak (Kalimantan Utara). Sebagai bagian dalam upaya revolusi, dijelaskan bahwa musuh-musuh revolusi adalah mereka-mereka yang mendukung imperialism dan kolonialisme. Presiden Soekarno melihat pendirian Federasi Malaysia yang diprakarsai oleh Inggris sebagai upaya dari sebuah negara imperialis yaitu Inggris untuk mendirikan kembali tonggak-tonggak imperialism dan kolonialisme di Malaysia. Akhirnya Presiden Soekarno melalui pidato beliau memulai konfrontasi dengan meneriakkan “Ganyang Malaysia” yang di sambut positif oleh seluruh rakyat Indonesia.¹¹ Slogan “Ganyang

¹⁰ Moeljanto, D.S dan Taufiq Ismail, 1995, *Praharra Budaya (kilas baliko fensif Lekra/PKI DKK)*, Bandung: Mizan

¹¹ MC.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Jogjakarta,1991), hal. 567

Malaysia", membuat hubungan Indonesia dan Malaysia semakin merenggang berujung kepada pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara. Politik konfrontasi yang dilakukan Soekarno terhadap Malaysia, hampir sama dengan politik konfrontasi yang dilakukan terhadap Belanda pada konfrontasi Irian Barat. Soekarno mengambil jalan konfrontasi di bidang ekonomi, politik dan juga konfrontasi fisik. Konfrontasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dengan memutus hubungan ekonomi dengan Maaysia.

Konfrontasi politik yang terjadi antara Indonesia dengan Inggris bersama dengan Malaysia terjadi dengan memuncaknya demonstrasi-demonstrasi anti Inggris dan Malaysia. Pemerintah juga telah melakukan konfrontasi politik dengan jalan yang lebih mengejutkan lagi, Presiden Soekarno menegaskan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia akan keluar dari keanggotaan PBB jika negara boneka Malaysia dijadikan Dewan Keamanan PBB. Puncaknya tanggal 7 Januari 1965 Indonesia resmi keluar dari PBB. Sama halnya dengan upaya pembebasan Irian Barat beberapa tahun yang lalu, konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia juga mulai bergerak ke arah konfrontasi fisik. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengumumkan Dwikora atau Dwi Komandi Rakyat yang ditujukan kepada 21 juta sukarelawan dan rakyat seluruh nya. Adapun isi Dwikora tersebut adalah:¹²

Pertama : Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia

Kedua : Bantu perjuangan Revolusiner rakyat Malaya, Singpura, Sabah, Serawak, Brunei untuk membubarkan negara Malaysia. Pasca Perang Dunia ke-II banyak lahir gerakan-gerakan pembebasan, hampir di seluruh Asia tak terkecuali Nasionalisme Indonesia yang di dasarkan pada keinginan lepas dari penjajahan dan berrdaulat menjadi negara merdeka. Nasionalisme di artikan sebagai semangat kebangsaan dan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan Negara. Pada masa Demokrasi

Terpimpin, masalah nasionalisme diambil alih oleh negara. Nasionalisme politik pun digeser kembali ke nasionalisme politik sekaligus kultural dan berakhir pula situasi ini dengan terjadinya tragedi nasional 30 September 1965. Gencar-gencarnya Jargon menjadi plat from dan oleh Soekarno dengan kelihaihan berorasi didepan publik benar-benar di manfaatkan, sekumpulan massa yang berkumpul langsung bersemangat dan berkobar Nasionalismenya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap antinekirim yang berakar pada Marhaenisme dan NASAKOM merupakan *worldview* (pandangan hidup) Sukarno yang sangat khas dan berpengaruh hingga sekarang, Soekarno mengabdi untuk Indonesia sejak masa penjajahan hingga Demokrasi Terpimpin. Bagi Soekarno, Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang bebas dari cengkraman neokolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa barat, di mana ia juga menyebarkan semangat ini ke seantero Asia dan Afrika. *Worldview* tersebut diantaranya diekspresikan lewat jargon-jargon yang dilontarkan oleh Soekarno.

D. Jargon Sebagai Alat Pembentuk Opini

Jargon politik yang dipopulerkan oleh media melalui percetakan pers merupakan jargon-jargon untuk mempropaganda massa yang digunakan sebagai pembentuk opini masyarakat pada bidang tertentu dan kepentingan pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Dalam Konteks Komunikasi Politik, maka media memiliki peran sebagai berikut : 1. Media melakukan fungsi edukasi politik, 2. Media memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan isu politik, dan 3. Media melakukan fungsi pemasaran politik dimana ketiga fungsi tersebut merupakan fungsi yang dapat menyebabkan propaganda politik secara besar-besaran demi mempengaruhi masyarakat pada tataran kognisi, afeksi, dan behavior.

Kelahiran teks melalui jargon-jargon politik tidak lahir begitu saja. Dalam tinjauan komunikasi sosiokultural, pesan dalam bentuk non verbal seperti teks memiliki beberapa asumsi yang menciptakan makna bagi semua pelaku komunikasi yang terlibat di dalamnya. Teori aksi berbicara misalnya, menganggap pesan dalam teks memiliki maksud untuk

¹² Kartodirjo; Sartono, dan Marwati Djoned Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia*. VI. Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1975

memberitahukan mengenai harapan, tindakan dan langkah-langkah yang mesti ditempuh agar komunikasi dapat efektif.

Melalui jargon politik, teori aksi berbicara memiliki empat kemungkinan dari lahirnya sebuah pesan, yaitu: pertama, melahirkan wacana yang memiliki tujuan dan masalah untuk diungkapkan, kedua menegaskan sesuatu melalui ide-ide atau usulan agar rakyat meyakini kebenarannya, ketiga adalah pemenuhan ide atau usulan yang berangkat dari harapan dan masalah melalui tindakan-tindakan kongkret, dan yang keempat adalah bagaimana pemenuhan ide-ide tersebut kemudian mempengaruhi rakyat.

Opini publik dalam pemerintahan demokratis merupakan hal yang esensial. Pada prinsipnya, apa yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan apa yang dipikirkan dan disuarakan oleh rakyat. Opini publik merupakan kumpulan pendapat dari massa terhadap suatu isu atau kondisi tertentu. Publik dan masyarakat berbeda. Jika masyarakat sifatnya teratur, maka publik tidak. Ruang lingkup publik lebih kecil dari masyarakat, karena publik terdiri dari mereka yang tertarik akan suatu isu namun dalam skala yang masif. Interaksi yang terjadi melalui media massa memungkinkan publik memiliki jumlah massa yang kemudian terus berkembang. Opini publik adalah gejala bersegi banyak yang disusun melalui saling pengaruh di antara proses personal, proses sosial, dan proses politik, dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan massa, kelompok, dan rakyat.

E. Jargon-jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin

Jargon merupakan ungkapan bahasa yang menerangkan situasi dan kondisi pada saat jargon tersebut dikeluarkan. Tentu ada alasan, latar belakang dibalik dikelurkannya suatu jargon politik, begitupula yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin. Oleh karena itu untuk mengetahui hal tersebut akan disajikan analisa-analisa mengenai jargon politik yang ada pada masa Demokrasi Terpimpin.

Adapun jargon-jargon politik yang muncul pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 adalah sebagai berikut : Manifaste Politik, Usdek, Nasakom (Nasioanl, Agama Komunis), Marhaenisme, Rovolusi Belum Selesai, TAVIP

yang merupakan akronim dari Tahun Vivere Pricosolo, Go to Hell with your Aids, Persetan, Main Belakang, Tanpa Reserve yang arti harfiyahnya “tanpa syarat”. Trikora dan Dwikora, Ganefo akronim dari *Games of the New Emerging Forces*, Berdikari, Sukwan, Kita Bukan Bangsa Tempe, Subversi (pendongkel Negara), Antek-antek Kolonis, Boneka Imperialis, Ganyang Malaysia, Ini Dadaku mana Dadamu, Lagu ngak-ngik-ngok, NKRI harga mati.

DAMPAK JARGON POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

a. Dampak Politik

Masa antara tahun 1959 hingga 1965 dalam sejarah politik Indonesia dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Pada fase itu Soekarno bertahan di singgasana kekuasaan selama masih mampu mengendalikan kekuatan politik dalam negeri. Presiden Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat di bawah Mayor Jenderal Nasution adalah faktor-faktor kekuasaan dalam pemerintahan. Soekarno tidak mempunyai organisasi politik yang menjadi sandarannya. Pengaruh Soekarno cukup besar terhadap tentara, Soekarno memerlukan dukungan dari golongan politik yang bermusuhan dengan tentara. PKI, dengan organisasinya yang rapi dan ideologinya yang anti tentara, yang kemudian menjadi tumpuan Soekarno karena itulah Soekarno terus berusaha melindungi PKI dari berbagai usaha Nasution dan perwira-perwira lainnya untuk mengurangi pengaruh partai itu.¹³ Pers pada masa Demokrasi Terpimpin dijadikan alat politik oleh pemerintah dan keterlibatan media massa dengan kegiatan politik tidak semata-mata mencerminkan perhatian media terhadap politik melainkan menyiratkan pula adanya keterkaitan atas dasar satu kepentingan antara media massa dan kekuatan politik. Ideologi yang ditanamkan harus Pancasila, keyakinan mental Indonesia dan persoalan pokok Indonesia yakni bersifat revolusi Indonesia, musuh-musuh revolusi Indonesia adalah siapapun yang berada

¹³ Feith, Herbert, 1962, *The Decline of The Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca, London: Cornell University Press.

di luar revolusi Indonesia. Dalam manifesto politik jelas dinyatakan bahwa pemerintah Indonesia melawan imperialisme Belanda sewaktu menjajah kasus Irian Barat, jika Belanda dalam soal Irian Barat tetap membandel, tetapi *Berkepala Batu* maka semua modal Belanda akan habis riwayatnya sama sekali di bumi Indonesia.¹⁴

b. Dampak Sosial

Dekrit yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil. Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal dari sambutan yang hangat dari sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam dukungan yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara lainnya, seperti Mahkamah Agung dan KSAD.¹⁵ Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda bertindak sebagai menteri pertama. Manipol-Usdek dan Nasakom: Struktur Konstitusi dan Ideologi Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin sebenarnya, terlepas dari pelaksanaannya yang dianggap otoriter, dapat dianggap sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam pertengahan tahun 1950-an.¹⁶ Untuk menggantikan pertentangan antara partai-partai di parlemen, suatu sistem yang lebih otoriter diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Soekarno. Soekarno memberlakukan kembali konstitusi presidensial tahun 1945 pada tahun 1959 dengan dukungan kuat dari angkatan darat. Akan tetapi Soekarno menyadari bahwa keterikatannya dengan tentara dapat membahayakan kedudukannya, sehingga ia mendorong kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok sipil sebagai penyeimbang terhadap militer. Dari kelompok sipil ini yang paling

utama adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan juga walau tidak begitu signifikan peranan dari golongan agama, yaitu khususnya yang diwakili oleh NU yang tergabung dalam poros nasakom Soekarno semasa pemberlakuan demokrasi terpimpin. Meskipun pemimpin PKI maupun Angkatan Darat mengaku setia kepada Presiden Soekarno, mereka sendiri masing-masing terkurung dalam pertentangan yang tak terdamaikan.

Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Soekarno menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepada presiden. Pancasila ditekankan dan dilengkapi dengan serangkaian doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasakom. Dalam usahanya mendapatkan dukungan yang luas untuk kampanye melawan Belanda di Irian Barat dan Inggris di Malaysia, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia berperan sebagai salah satu pimpinan “kekuatan-kekuatan yang sedang tumbuh” di dunia, yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Nekolim (neokolonialis, kolonialis dan imperialis). Sebagai lambang dari bangsa, Soekarno bermaksud menciptakan suatu kesadaran akan tujuan nasional yang akan mengatasi persaingan politik yang mengancam kelangsungan hidup sistem Demokrasi Terpimpin. Sampai dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Juli 1959, Presiden Soekarno adalah pemegang inisiatif politik, terutama dengan tindakan dan janji-janjinya yang langsung ditujukan kepada pembentukan kembali struktur konstitusional. Akan tetapi, tekanannya kemudian mulai bergeser kepada tindakan simbolis dan ritual, serta khususnya kepada perumusan ideologi dan kemudian memberikan gagasan-gagasan berulang kali. Presiden Soekarno dalam hal ini menciptakan doktrin negara yang baru.¹⁷

¹⁴Tubapi, hlm 79

¹⁵ Poesponegoro, Marwati Djoened dkk., 1993, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, Jakarta: Depdikbud-Balai Pustaka, hlm. 311

¹⁶Crouch, Herbert, 1999, *Militer & Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm.44

¹⁷ Feith, Herbert, 1995 *Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 79

DAFTAR PUSTAKA

Aminuddin Kasdi, 2009, *Kau Merah Menjara* (Aksi sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965, Surabaya :YKCB-CICS.

Crouch, Herbert, 1999, *Militer & Politik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan,

Feith, Herbert, 1962, *The Decline of The Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca, London: Cornell University Press.

_____, 1995 *Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal: 2

H.Roslan.Abdulgani, 1961, *Penjelasan Manipol-Usdek, Bahan-bahan Indoctrinasi*. Djember: Penerbit Sumber Ilmu.

Kartodirjo; Sartono, dan Marwati Djoned Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia. VI*. Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1975

Moeljanto, D.S dan Taufiq Ismail, 1995, *Prahara Budaya (kilas baliko fensif Lekra/PKI DKK)*, Bandung: Mizan

MC.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Jogjakarta,1991), hal. 567

Onghokham, 1978, *Manusia dalam Kemelut Sejarah*,Jakarta:LP3S, hlm. 21

Rex, Mortimer, 2011, *Indonesian Communism Under Soekarno (Idiologi dan Politik 1959-1965)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.59

Soekarno, *Membangun Dunia Kembali (MDK)*, Kempen, 1960 hlm. 88-90.

